

**IDENTIFIKASI KEMISKINAN DI KABUPATEN KAMPAR
(STUDI KASUS DI DAERAH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)**

Lapeti Sari

Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam – Pekanbaru 28293

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kemiskinan di Kabupaten Kampar khususnya Kemiskinan di Daerah Pertanian dan Perkebunan.

Dari hasil penelitian diperoleh identifikasi antara lain: Rata-rata tingkat pendidikan penduduk miskin masih rendah. Porsi tertinggi adalah tamat SD (46,23 %), jenis pekerjaan kepala rumah tangga miskin yaitu di bidang perkebunan (36,68 %), kepemilikan lahan yang digarap saat ini ternyata paling tinggi adalah lahan milik sendiri (49,78%), kondisi bangunan yang ditempati masyarakat miskin adalah rumah kayu (76,57%), sarana Pengobatan yang dimanfaatkan masyarakat miskin adalah Puskesmas (74,08%), dan kemiskinan yang terjadi didominasi oleh karena tidak adanya lahan (66,90%).

Kata Kunci : kemiskinan, daerah pertanian dan perkebunan

PENDAHULUAN

Permasalahan klasik dan sampai saat ini belum ada solusi yang riil dalam menuntaskannya pemerintah pusat dan daerah adalah masalah kemiskinan, dan bahkan sering kali hanya dijadikan sebagai objek dalam proses pembangunan. Belum teratasinya masalah kemiskinan tersebut, mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak social, budaya, ekonomi dan politik.

Lambung kemiskinan di Kabupaten Kampar terkonsentrasi pada wilayah-wilayah pedesaan, dimana penduduk yang sangat miskin mencapai 73 persen dan penduduk miskin 71,60 persen yang berada pada lapangan usaha pertanian dan perkebunan. Sedangkan pada lapangan usaha lainnya seperti perdagangan dan jasa sebesar 10,79 persen sangat miskin dan 12,42 persen miskin, serta industry dan konstruksi sebesar 2,85 persen sangat miskin dan 4,07 persen miskin, namun

angka kemiskinannya relative rendah jika dibandingkan dengan lapangan usaha pertanian.

Kondisi penduduk miskin di Kabupaten Kampar dihadapkan pada masalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternative lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan public, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan. Kondisi ketidakmampuan dan keterbatasan yang dimiliki penduduk miskin di Kabupaten Kampar tersebut menyebabkan mereka dalam kondisi menganggur.

Dalam usaha mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kampar, pemerintah telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang sasarannya adalah penduduk miskin. Dalam usaha mengurangi beban hidup penduduk miskin terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok, telah disalurkan bantuan beras miskin kepada 9.704 jiwa (72,62 %) penduduk sangat miskin dan 11.785 jiwa (66,88%) penduduk miskin. Bantuan beasiswa diberikan kepada 276 jiwa (2,12 %) penduduk sangat miskin. Program dana bergulir telah disalurkan kepada 277 jiwa (2,13%) penduduk sangat miskin dan 406 jiwa (2,30%) penduduk miskin. Di bidang kesehatan pemerintah memberikan kartu sehat yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya kesehatan dan telah disalurkan kepada penduduk sangat miskin sebanyak 2.696 jiwa (20,73%) penduduk miskin sebanyak 3.129 jiwa (17,76%). Kemudian pemerintah juga melakukan sertifikasi lahan penduduk sangat miskin sebanyak 519 jiwa (3,99 %) dan penduduk miskin sebanyak 739 (4,19%). Sedangkan sebanyak 490 jiwa (3,76%) penduduk sangat miskin dan 604 jiwa (3,43%) penduduk miskin menerima program bantuan lainnya.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multisektoral yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari tingkat pusat sampai pada individu masyarakat. Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila pemerintah melakukan kebijakan yang serius dan memihak kepada keluarga miskin. Namun seringkali kebijakan yang dibuat justru kurang memihak keluarga miskin, akibatnya kebijakan yang ada semakin memperburuk kondisi keluarga miskin bahkan menyebabkan seseorang yang tidak miskin menjadi miskin. Oleh karena itu, usaha penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin.

Istilah kemiskinan sangat sulit untuk didefinisikan secara tepat. Dalam literature kita mengenal "kemiskinan mutlak" (*absolute proverty*) dan "kemiskinan relative" (*relative proverty*). Konsep kemiskinan mutlak adalah berdasarkan taksiran tingkat pendapatan yang diperlukan untuk pembelian pangan guna memenuhi rata-rata kebutuhan nutrisi setiap orang dewasa dan anak dalam sebuah keluarga.

Sedangkan kemiskinan relative adalah derajat ketidakmerataan dalam pendapatan. Jika pendapatan suatu daerah (nasional) meningkat, sehingga derajat kemiskinan absolute turun, tetapi jika pendapatan si kaya meningkat lebih cepat dari pada pendapatan si miskin, kemiskinan relative meningkat dalam arti distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar hidup yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan lain-lain yang sering diukur dengan Human Development Index (HDI). Kemiskinan juga dapat dipandang dari dimensi kerentanan dan resiko untuk jatuh miskin (*vulnerability and risk*) dan ketidakberdayaan secara tidak didengarnya suara orang miskin (*powerless and voiceless*) dalam proses kehidupan bermasyarakat. (BPS, 2004)

Kemiskinan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kondisi lainnya yang kurang menguntungkan. Kemiskinan merupakan penyebab utama kelemahan fisik (*physical weaknesses*) melalui kekurangan pangan dan gizi, tubuh yang kecil, dan ketidakmampuan untuk menjangkau atau membayar terhadap jasa-jasa layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Kemiskinan juga merupakan penyebab utama terhadap isolasi karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan/sekolah, tinggal pada kawasan pemukiman kumuh dan liar (*illegal*), terhadap vulnerabilitas melalui kekurangan asset pengeluaran yang besar, dan terhadap ketidakberdayaan (*powerlessness*) karena kurangnya kekayaan yang dapat menaikkan status sehingga si miskin tidak punya suara dalam proses pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan. Kelemahan fisik sebuah rumah tangga menyebabkan kemiskinan melalui beberapa cara, melalui produktifitas yang rendah untuk tenaga perempuan dan mereka yang lemah, melalui pengunduran diri atau melemahnya tenaga kerja karena sakit.

Vulnerabilitas adalah bagian dari banyak keterkaitan. Ini berhubungan dengan kemiskinan melalui penjualan atau penjaminan asset-asset produktif, terhadap kelemahan fisik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, waktu dan energy untuk disubstitusikan dengan uang, terhadap isolasi melalui pengunduran diri apakah spasial atau social.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemiskinan di Kabupaten Kampar khususnya Kemiskinan di Daerah Pertanian dan Perkebunan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan juga data primer, dengan survey rumah tangga. Teknik pengambilan sampel akan merefleksikan situasi rumah tangga miskin di Kabupaten Kampar. Analisa yang digunakan adalah statistic deskriptif berupa persentase dan rata-rata dan juga dilakukan validasi maupun cross check pada data-data yang diperoleh, agar data yang digunakan untuk analisis benar-benar representatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan masalah kemiskinan dapat ditelusuri dari berbagai aspek, yaitu soaial, ekonomi, psikologi, politik dan aspek lainnya. Aspek social terutama diakibatkan oleh keterbatasan interaksi social dan penguasaan informasi dan teknologi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya penguasaan factor produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutam akibat rasa rendah diri, fasilitas, malas dan rasa terisolir. Sedangkan dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, dan posisi yang lemah dalam proses pengambilan keputusan.

Berbagai aspek yang menyebabkan kemiskinan tersebut akan turut mempengaruhi kinerja pembangunan daerah, karena kondisi ketidakmampuan yang melekat pada penduduk miskin akan berpengaruh pada rendahnya produktifitas yang pada akhirnya menentukan tingkat output pembangunan. Dalam penanggulangan masalah kemiskinan hendaknya orang miskin tidak hanya dilihat sebagai orang yang serba tidak memiliki, melainkan juga harus dilihat sebagai orang yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan dalam upaya mengatasi semua persoalan yang melatarbelakangi kemiskinannya.

Otonomi daerah telah membawa perubahan pada semakin pendeknya rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat. Dekatnya jarak pusat-pusat pelayanan masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai pelayanan public, terutama bagi penduduk/rumah tangga miskin. Namun demikian penduduk/rumah tangga miskin sering menghadapi kekurangan jaringan dan stuktur social yang mendukung dalam usaha mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan produktifitas. Sehingga kemiskinan yang terjadi bukan dikarenakan ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur social dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja dan keluar dari belenggu kemiskinannya.

Kondisi ekonomi masyarakat petani di desa bergantung dari hasil panen usaha pertanian konvensional termasuk peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, guna memenuhi kebutuhan hidup harian, mingguan, bulanan, musiman, dan kebutuhan hidup tahunan. Rendahnya pendapatan keluarga pada masyarakat petani perdesaan selalu diidentifikasi dan diisukan penyebabnya adalah: (1) usaha tani masyarakat masih bersifat konvensional/tradisional, (2) petani bodoh/malas, (3) penerapan teknologi masih rendah, (4) kemampuan permodalan masih rendah/tidak ada, (5) kuantitas dan kualitas produksi (hasil panen) rendah karena penggunaan bibit seadanya, dan tanpa pemeliharaan yang baik, (6) harga jual hasil panen masih rendah karena tidak memiliki akses pengolahan hasil, terlilit utang melalui tengkulak/pengijon.

Angka penduduk miskin di daerah pertanian dan perkebunan cukup tinggi seperti di Kecamatan Tapung adalah 18,81 persen dan rumah tangga miskin 21,16 persen. Angka penduduk miskin di Kecamatan Kampar Kiri Hilir adalah 38,90 persen dan rumah tangga miskin 42,87 persen. Angka penduduk miskin di Kecamatan Bangkinang Seberang adalah 27,39 persen dan rumah tangga miskin 32,40 persen.

Dari data yang ada ternyata tingkat kemiskinan daerah pertanian dan perkebunan lebih tinggi dibanding dengan daerah perkotaan. Hal ini menggambarkan hubungan antara ketersediaan sarana prasarana dan informasi yang tersedia akan membawa pengaruh terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Disisi lain terlihat bagaimana rendahnya kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya alam, karena secara umum sumberdaya yang ada di daerah perkebunan jauh lebih tersedia dibanding daerah perkotaan.

Berikut ini merupakan gambaran kemiskinan di Kabupaten Kampar yang terdapat pada wilayah-wilayah pertanian dan perkebunan.

Tabel 1 : Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin pada Kecamatan Sampel di Daerah Pertanian dan Perkebunan (Persen)

No	Kecamatan	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SMU	Diploma	Sarjana
1.	Tapung	38,18	36,36	26,83	12,20	4,88	5,45
2.	Kampar Kiri Hilir	23,26	37,21	23,26	16,28	0,00	0,00
3.	Bkn Seberang	13,95	65,12	13,95	6,98	0,00	0,00
	Rata-rata	25,13	46,23	21,35	11,82	1,63	1,82

Sumber : Data Hasil Survey

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk miskin daerah pertanian dan perkebunan masih rendah. Porsi tertinggi adalah tamat SD (46,23 %) dan tidak tamat SD (25,13%). Tingkat pendidikan yang rendah membawa konsekuensi logis terhadap intelektualitas masyarakat yang akhirnya membawa dampak terhadap rendahnya tingkat kreativitas dalam pemanfaatan sumberdaya, yang sebenarnya sudah banyak tersedia di daerah terutama sumberdaya alam.

Semangat belajar bagi anak usia sekolah sangat tinggi. Mereka berjalan kaki ke sekolah (75,55%), naik sepeda (18,04%), naik ojek (4,795) dan naik angkot hanya (1,67%). Tingkat putus sekolah bagi anak usia sekolah (7-15 tahun) sudah rendah, Kecamatan Bangkinang Seberang (2,50%), Kampar Kiri Hilir (6,90%) dan Tapung (15,79%). Alasan mereka putus sekolah karena tidak mampu beli buku

(92,59%), membantu orang tua (37,04%) dan arena malas (48,15%). Kondisi ini memberikan gambaran pengaruh kemiskinan membawa dampak yang luar biasa terhadap kebodohan. Lokasi daerah yang semakin dekat dengan perkotaan ternyata membawa pengaruh positif terhadap semangat belajar dan jenjang pendidikan yang dicapai.

Tabel 2 : Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Miskin pada Kecamatan Sampel di Daerah Pertanian dan Perkebunan (Persen)

No	Kecamatan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan	Jasa	Lainnya
1.	Tapung	9,68	58,06	4,84	19,35	8,06
2.	Kampar Kiri Hilir	8,16	38,78	0,00	32,65	20,41
3.	Bkn Seberang	32,76	13,79	0,00	20,69	32,76
	Rata-rata	16,87	36,68	1,61	24,23	20,41

Sumber : Data Hasil Survey

Jenis pekerjaan kepala rumah tangga miskin cukup bervariasi, ada yang di bidang pertanian dan ada yang di bidang jasa. Dari data terlihat bahwa tingkat kemiskinan daerah pertanian dan perkebunan justru terjadi pada sector andalan pencaharian mereka, yaitu di bidang perkebunan 36,68 persen. Hal ini menggambarkan bahwa pertanian dan perkebunan belum memberikan kontribusi besar pada penduduk miskin yang memiliki lahan terbatas.

Tabel 3 : Status Kepemilikan Lahan Rumah Tangga Miskin pada Kecamatan Sampel di Daerah Pertanian dan Perkebunan (Persen)

No.	Kecamatan	Milik Sendiri	Pusaka Orang tua	Milik Orang Lain Bagi Hasil	Sewa/ Kontak	Lainnya
1.	Tapung	72,09	16,28	6,98	0,00	4,65
2.	Kampar Kiri Hilir	32,00	4,00	16,67	0,00	48,00
3.	Bkn Seberang	45,24	14,29	35,71	0,00	4,76
	Rata-rata	49,78	11,52	19,79	0,00	19,14

Sumber : Data Hasil Survey

Kepemilikan lahan yang digarap saat ini ternyata paling tinggi adalah lahan milik sendiri (49,78%), lahan milik orang lain atau bagi hasil (19,79%), dan lahan pusaka orang tua (11,52%). Dengan kondisi ini semakin memperjelas bagaimana

kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya masih terbatas. Dengan kepemilikan lahan sendiri dan bagi hasil seharusnya sebagai masyarakat yang mendominasi pertanian dan perkebunan dapat memanfaatkan lahan lebih produktif.

Tabel 4 : Bangunan Rumah yang Ditempati Rumah Tangga Miskin pada Kecamatan Sampel di Daerah Pertanian dan Perkebunan (Persen)

No	Kecamatan	Kayu	Semi Permanen	Permanen	Lainnya
1.	Tapung	68,73	19,05	22,22	0,00
2.	Kampar Kiri Hilir	92,00	6,00	2,00	0,00
3.	Bkn Seberang	68,97	17,24	13,79	0,00
	Rata-rata	76,57	14,10	12,67	0,00

Sumber : Data Hasil Survey

Kondisi bangunan yang ditempati masyarakat miskin adalah rumah kayu (76,57%), semi permanen (14,10%) dan permanen (12,67%). Kondisi ini secara nyata menggambarkan bagaimana masih bermasalahnya kondisi tempat tinggal masyarakat yang dominan masih tinggal di rumah kayu yang kurang representative. Kondisi bangunan rumah di daerah miskin pertanian dan perkebunan ternyata lebih buruk dibandingkan masyarakat miskin diperkotaan. Hal ini diidentifikasi dari rendahnya persentase rumah permanen dan semi permanen, yang kondisinya lebih baik dari rumah kayu.

Tabel 5 : Pelayanan Kesehatan Rumah Tangga Miskin pada Kecamatan Sampel di Daerah Pertanian dan Perkebunan (Persen)

No	Kecamatan	Puskemas	Rumah Sakit	Dokter/ Bidan Desa	Dukun	Diobati Sendiri	Lainnya
1.	Tapung	35,00	10,00	10,00	5,00	7,50	32,50
2.	Kampar Kiri Hilir	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bkn Seberang	87,23	4,26	2,13	0,00	2,13	4,26
	Rata-rata	74,08	4,75	4,04	1,67	3,21	12,25

Sumber : Data Hasil Survey

Sarana Pengobatan yang dimanfaatkan masyarakat miskin adalah Puskesmas (74,08%), Dokter/bidan desa (4,04%) dan Rumah Sakit (4,75%). Hal ini menggambarkan sudah baiknya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan pada layanan yang sudah dapat dipertanggung jawabkan, karena sudah ditangani oleh para medis yang sesuai standar. Pelayanan yang diberikan Puskesmas sudah baik (73,17%), kurang baik (14,49%) dan tidak tahu (12,34%). Keluhan yang masih muncul tentang Puskesmas adalah waktu pelayanan yang tidak tepat, kurangnya tenaga medis serta jumlah dan jenis obat yang tersedia. Masyarakat miskin yang belum memanfaatkan Puskesmas biasanya disebabkan oleh jarak yang jauh dengan lokasi, sehingga perlu diprogramkan penambahan jumlah dan volume kegiatan Puskesmas keliling.

Kondisi yang sangat menggembirakan adalah dalam pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan perhatian terhadap balita yang semakin membaik dari masyarakat miskin. Ibu hamil yang rutin memeriksakan kandungannya rata-rata sebesar 86,67 persen, bahkan ada yang sudah mencapai 100 persen. Sedangkan tingkat pemberian vitamin A kepada balita sudah mencapai 76,91 persen. Dengan perkembangan ini diharapkan akan menekan kematian ibu melahirkan dan meningkatkan kesehatan balita yang akan menentukan kualitas generasi di masa yang akan datang, dan akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dimasa yang akan datang.

Tabel 6 : Faktor Penyebab Rumah Tangga Miskin pada Kecamatan Sampel di Daerah Pertanian dan Perkebunan (Persen)

No.	Kecamatan	Tidak Ada Lahan	Tidak Ada Modal	Tidak Berpendidikan	Sakit-sakitan	Tidak Dapat Bantuan
1.	Tapung	52,73	52,73	65,45	20,00	20,00
2.	Kampar Kiri Hilir	76,27	68,18	52,27	2,27	4,55
3.	Bkn Seberang	71,70	79,25	50,94	28,30	43,40
	Rata-rata	66,90	66,72	56,22	16,86	22,65

Sumber : Data Hasil Survey

Kemiskinan yang terjadi didominasi oleh karena tidak adanya lahan (66,90%), tidak adanya modal (66,72%) dan tidak berpendidikan (56,22%). Suatu hal menarik bila dibandingkan dengan kondisi daerah perkotaan adalah justru pada masyarakat miskin pertanian dan perkebunan, persentase rumah tangga miskin yang tidak memiliki lahan, mempunyai persentase yang cukup besar. Hal ini menjelaskan bahwa terjadinya masyarakat miskin tidak hanya karena keterbatasan modal, tetapi juga disebabkan oleh telah terjadinya marginalisasi dan alih fungsi lahan. Gambaran tersebut membawa indikasi bahwa program pengentasan kemiskinan tersebut perlu diarahkan pada penguatan modal dan mempermudah mendapatkan akses modal, dan penataan kepemilikan dan tata guna tanah.

Tabel 7 : Pemecahan Masalah Keuangan Rumah Tangga Miskin pada Kecamatan Sampel di Daerah Pertanian dan Perkebunan (Persen)

No.	Hal yang dilakukan ketika mengalami kesulitan keuangan keluarga	Tapung	Kampar Kiri Hilir	Bkn Seberang	Rata-rata
1.	Mendatangi sanak family u/ minta bantuan	61,70	92,86	69,64	74,73
2.	Mendatangi teman/sahabat	37,25	89,47	41,07	55,93
3.	Mengurangi jumlah masakan beras	46,67	66,67	24,07	45,80
4.	Mengurangi lauk pauk dan sayuran	52,17	33,33	35,19	40,23
5.	Bapak bekerja semakin lama	24,44	33,33	18,18	25,32
6.	Ibu bekerja semakin lama	8,89	0,00	16,36	8,42
7.	Anggota rumah tangga bekerja	2,22	0,00	18,52	6,91
8.	Anak dikeluarkan dari sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Lainnya	47,37	0,00	33,33	26,90

Sumber : Data Hasil Survey

Upaya pemecahan masalah keuangan yang dilakukan disaat kesulitan adalah dengan mendatangi sanak family dan sahabat. Bagi pekebun, mereka banyak melakukan peminjaman kepada tauke (pedagang pengumpul) dan pemilik kebun. Kondisi ini bisa membawa akibat rendahnya harga penjualan produk mereka dan pembelian harga tinggi terhadap kebutuhan hidup karena bargaining position yang sangat rendah, sehingga mendorong munculnya pasar monopoli monopsonistik yang sangat merugikan pekebun.

Kemudian mereka juga mencoba melakukan dengan menekan konsumsi beras, lauk pauk dan sayuran yang dikonsumsi keluarga. Kondisi ini menggambarkan betapa beratnya beban yang harus dihadapi keluarga miskin, karena mereka setiap saat tidak terbebas dari hutang kepada orang sekitarnya, sehingga semakin lama kondisi mereka akan semakin tergantung kepada orang lain. Disamping itu dengan menekan tingkat konsumsi keluarga, yang sebenarnya sudah dibawa standar, maka dalam jangka panjang dikhawatirkan akan terjadi penurunan gizi masyarakat miskin yang pada akhirnya akan membawa akibat terhadap penurunan kualitas sumberdaya manusia.

Namun demikian cukup menggembirakan walaupun mereka dalam keadaan kesulitan tetapi tidak mengeluarkan anaknya dari sekolah, berarti masih ada kesadaran bahwa pendidikan bagi generasi mendatang masih dianggap penting. Kesadaran dan keinginan tersebut perlu diimbangi dengan penyediaan kemudahan

dan perhatian dari pemerintah daerah, agar terhindar dari lost generation, dimana terjadi kemunduran intelektualitas masyarakat perdesaan.

KESIMPULAN

- a. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk miskin daerah pertanian dan perkebunan masih rendah. Porsi tertinggi adalah tamat SD (46,23 %) dan tidak tamat SD (25,13%).
- b. Jenis pekerjaan kepala rumah tangga miskin cukup bervariasi. Dari data terlihat bahwa tingkat kemiskinan daerah pertanian dan perkebunan justru terjadi pada sector andalan pencaharian mereka, yaitu di bidang perkebunan 36,68 persen.
- c. Kepemilikan lahan yang digarap saat ini ternyata paling tinggi adalah lahan milik sendiri (49,78%), lahan milik orang lain atau bagi hasil (19,79%), dan lahan pusaka orang tua (11,52%).
- d. Kondisi bangunan yang ditempati masyarakat miskin adalah rumah kayu (76,57%), semi permanen (14,10%) dan permanen (12,67%).
- e. Sarana Pengobatan yang dimanfaatkan masyarakat miskin adalah Puskesmas (74,08%), Dokter/bidan desa (4,04%) dan Rumah Sakit (4,75%).
- f. Kemiskinan yang terjadi didominasi oleh karena tidak adanya lahan (66,90%), tidak adanya modal (66,72%) dan tidak berpendidikan (56,22%).

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Kampar, 2007. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kampar
- BPS, 2007 Kampar Dalam Angka
- BPS, Bappenas, UNDP, 2004. Indonesia Laporan Pembangunan 2004 Ekonomi Dari Demokrasi. Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia, Jakarta
- Elfindri dkk, 2005. Kajian Kemiskinan Daerah Pedesaan dan Perkotaan di Sumatera Barat. Laporan Penelitian, Kerja sama Dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Mukherjee, Nilanjana, 2002. Masyarakat Miskin dan Mata Pencaharian: Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia, Bank Dunia, Jakarta
- Tatang Wiranto, 2004. Perencanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Lembaga Penelitian Semeru, Jakarta